



Buletin

NENG NING NUNG NANG

Menuju Satu Abad Tamansiswa

Edisi April 2021



Foto: Pranata (1959) Ki Hadjar Dewantara :
Perintis perjuangannya kemerdekaan Indonesia, Balai Pustaka

3 | PENDIDIKAN DAN
PEMBANGUNAN BANGSA

5 | RM SUWARDI SURYANINGRAT
DI TENGAH REFORMASI PENDIDIKAN
PAKUALAMAN DAN EROPA

8 | MELAWAN KEBIJAKAN
SEKOLAH SWASTA SEBAGAI
EMBEL-EMBEL

11 | **TAMANSISWA**
Persemaian Kusuma Bangsa



Buletin

NENG NING NUNG NANG

Menuju Satu Abad Tamansiswa

Edisi April 2021

DEWAN PENGARAH

Ki H.M. Idham Samawi
Ki Priyo Dwiwarso
Ki Sugiharto
Ki Sapto Amal Damandari
Ki Robby Kusumaharta
Ki Amiluhur Soeroso

DEWAN PAKAR

Ki Cahyono Agus Dwikoranto
Ki Dadang Juliantara
Ki Darmaningtyas
Ki Roso Daras
Ki Zuli Qodir
Ki Fajar Sudarwo

PEMIMPIN UMUM

Ki Prijo Mustiko

PEMIMPIN REDAKSI

Ki Sigit Sugito

DEWAN REDAKSI

Ki Wahyana Giri M.C
Ki Sarwanto H. Swarso
Nyi Umi Kulsum
Ki Pamuji Raharjo

ARSIPARIS & DOKUMENTASI

Odie Shalahudin

LAYOUT & ARTISTIK

Ki Ali Mashadi
Ki Danuri

PEMIMPIN USAHA

Ki Agus Budi Raharjo

ALAMAT REDAKSI

Jl. Sagan 20 Yogyakarta
Email: khdinstitute@gmail.com
CP. 081931791185



Redaksi menerima sumbangan berbentuk tulisan berupa esai, gagasan, puisi dan sketsa. Serta berita kegiatan cabang di dari seluruh nusantara dengan tidak mengandung unsur SARA. Tulisan dikirim ke alamat email : khdinstitute@gmail.com

Salam dan Bahagia,

ANTOLOGI PUISI NENG NING NUNG NANG



Rapat kurasi Antologi puisi Neng Ning Nung Nang yg diikuti 160 peserta dari seluruh Nusantara. Peserta termuda usia 14 th siswa Tamansiswa Pematang Siantar, peserta tertua 80 tahun dari Banyumas. Tim kurator terdiri Umi Kulsum, Sigit Sugito, Marwanto dan Agus Budi Raharjo.

ANTOLOGI NENG NING NUNG NANG.Seni merupakan salah satu unsur kebudayaan yang punya peran membangun kepribadian.seni lebih mengedepankan intuisi, emosi dan perasaan, maka seni lahir dengan penuh keindahan juga terkandung akal atau ilmu. Begitu pula seni sastra , Puisi begitu pula . Panitia Satu Abad Tamansiswa mencoba mendekati Ki Hadjar Dewantara kepada masyarakat luas melalui Puisi.Bersyukur atusiasme masyarakat untuk mengikuti Antologi Puisi Neng Ning Nung Nang dalam rangka Menuju Satu Abad Tamansiswa luar biasa, bukan dari sisi jumlah peserta yang 170 an tetapu dari sebaran peserta yang ikut bersal dari berbagai sudut wilayah Nusantara, ada dari Pematang siantar, Riau, Kalimantan, Maluku, NTT, Bali dan tentu saja kota kota besar di Pulau Jawa. Dilihat dari usia, ada siswa SMP berusia 14 tahun , SMA, Mahasiswa dan masyarakat sastra secara umum yang berusia 81 tahun.Dari sisi kwantitas dengan peserta yang masuk 170 naskah sangat bersyukur artinya niat awal kegiatan ini di selenggarakan adalah bagian mensosialisasikan Satu Abad Tamansiswa bisa dianggap berhasil. Tetapi dari sisi kualitas kita perlu mengkurasi dengan ketat yang memenuhi kriteria sastra yang berlaku.Dan proses itu sedang berjalan.Alhamdulillah buku ini rencana akan di cetak dengan dukungan dari Paniradyo Kaistimewaan melalui Dana Keistimewaan tahun 2021 semoga seluruh bagian roadmap menuju Satu Abad Tamansiswa akan lancar sesuai yang direncanakan sampai pada acara puncak 3 Juli 2022.

Salam redaksi Ki Sigit Sugito

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA



Ki Idham Samawi

Pandemi Global Covid-19, telah memberi kita banyak sekali informasi yang sebelumnya tidak tampak di permukaan. Dalam konteks lokal dan nasional, kita dapat melihat bagaimana upaya bersama dilakukan untuk mengatasi Pandemi. Dari kerja pemerintah, kerja warga, kerja antara pemerintah dan warga, dan kerjasama di kalangan warga sendiri. Kesemuanya telah membentuk suatu konfigurasi yang sangat meyakinkan, bahwa sebagai bangsa, kita mempunyai jenis ketangguhan tertentu dalam menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan kita bersama.

Pada tingkat global, kita menyaksikan ragam respon dari berbagai bangsa. Ada yang menunjukkan daya responsi yang baik, ada yang dalam rata-rata dan ada pula yang lemah, sehingga korban yang jatuh demikian besar. Dari pengalaman itu, kita juga bisa belajar, tentang bagaimana menggerakkan kekuatan nasional dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Namun, yang tidak kalah penting dari situasi tersebut adalah bahwa keselamatan masing-masing negeri, telah mendorong muncul politik kepentingan nasional yang sangat kuat.

Kenyataan itu perlu kita lihat sebagai suatu keniscayaan bahwa setiap bangsa pada akhirnya akan mengedepankan apa yang menjadi kepentingan bangsa tersebut. Namun, apakah keniscayaan ini tidak membuka ruang bagi kecenderungan lain, yakni katakan saja suatu sikap yang tidak mengedepankan kepentingan bersama, tetapi hadirnya suatu kepentingan sempit

yang mengorbankan kepentingan nasional. Sejarah di banyak negeri memperlihatkan adanya kemungkinan tersebut, kendati secara nalar sulit untuk dipahami.

Jika demikian halnya, maka yang perlu dipersoalkan adalah apa yang perlu dipersiapkan oleh bangsa, agar pada situasi apapun dan kapanpun, seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, akan bersikap patriotik, yakni mengedepankan kepentingan bersama, atau meletakkan kepentingan bangsa dan negara, diatas kepentingan diri sendiri, atau kelompok yang eksklusif dan terbatas.

Kembali Kepada Pendidikan

Apabila pengalaman bangkitnya pendidikan yang berhadapan dengan pendidikan kolonial, boleh disederhanakan, maka mungkin kita akan mendapatkan rumusan berikut ini: karena pendidikan kolonial mengabdikan untuk kepentingan kolonial, yang berarti tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia, maka tidak ada cara lain bagi bangsa Indonesia kecuali membentuk pendidikannya sendiri. Artinya, pendidikan kita, sesungguhnya lahir dari rahim anti kolonial, atau datang dari semangat emansipasi.

Bagi para penggerak pendidikan pada masa itu, telah berkembang semacam keyakinan bahwa: apa yang kini ada adalah produk pendidikan periode sebelumnya. Untuk agar bangsa mendapatkan kemerdekaan, maka harus

ada satu lapis generasi yang telah punya kesadaran kemerdekaan. Suatu kesadaran bahwa hanya dalam alam merdeka, maka bangsa akan lebih leluasa mencapai apa yang dicita-citakannya. Hal ini yang mungkin dapat menjelaskan, bangkitnya kegaيران menyelenggarakan pendidikan pada periode tersebut, seiring dengan lahirnya Tamansiswa.

Apakah lapis sosial yang menyangga revolusi kemerdekaan pada tahun 1945, adalah produk dari pendidikan periode sebelumnya? Tentu saja kita membutuhkan kajian tersendiri untuk membuktikannya. Namun, apabila logika di atas dapat dipakai, yakni bahwa apa yang ada sekarang adalah produk pendidikan pada periode sebelumnya, maka dapat lah dikatakan bahwa pendidikan yang berkembang sejak awal abad XX, merupakan penyumbang pendidikan pembentukan lapis sosial yang ikut menghasilkan kemerdekaan bangsa.

Pembangunan Bangsa

Tantangan bagi sebuah bangsa yang merdeka adalah pentingnya kesegaran untuk menyelenggarakan pendidikan yang sepenuh mengabdikan pada kepentingan bangsa. Apabila kemerdekaan adalah awal dan masa depan yang dikehendaki adalah ujungnya, maka dalam kerangka pendidikan, dua titik tersebut seharusnya dijembatani oleh kurikulum (pendidikan). Masalahnya, apakah paska proklamasi kemerdekaan telah tersedia kesempatan untuk menyusun pendidikan yang dibutuhkan bangsa?

Tidak dapat diingkari bahwa dalam kenyataannya, perjalanan bangsa penuh dinamika. Tarik menarik antara yang ideal (yang menjadi tujuan luhur bangsa) dengan apa yang nyata-nyata berlangsung, terus berlangsung. Bahkan tidak jarang, suatu formasi pragmatisme-transaksional yang mengemuka, sehingga yang ideal termarginalkan. Pada setiap periode kita

saksikan bagaimana pergulatan berlangsung. Dan kesemuanya itu, dapat diletakkan sebagai bahan pembelajaran bagi bangsa. Tentu pada waktunya kita perlu melakukan refleksi diri, yakni suatu proses dimana perjalanan bangsa ditinjau kembali dengan penuh kebijaksanaan, untuk agar kita dapat mengenali secara baik, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Jika kita anggap masa kini, merupakan momen yang memungkinkan bangsa membuat gerak sejarah, maka hal itu akan berarti saat ini pula dibutuhkan penataan pendidikan yang bersifat menyeluruh pula. Pernyataan ini sebenarnya masih membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif. Kalaupun pernyataan tersebut tetap diajukan, oleh karena: (1) didasarkan pada kenyataan bahwa apa yang menjadi cita-cita bangsa belum dapat dicapai; (2) masalah-masalah mendasar bangsa masih juga hadir, bahkan dalam kualitas yang makin meningkat; dan (3) tantangan global yang dapat mengancam keberadaan bangsa manakala kita gagal memberikan respon yang baik dan fundamental.

Lebih dari itu, kita ingin meletakkan pendidikan sebagai pintu utama dalam membangun bangsa. Disebut sebagai pintu utama, karena inti sari pokok pembangunan bangsa tidak lain dari membangun manusia Indonesia. Pada satu sisi pendidikan membutuhkan alam merdeka, agar seluruh peserta pendidikan, ada dalam kemerdekaan, dan pada sisi yang lain, pendidikan dengan watak emansipasi akan memungkinkan lahirnya suatu generasi yang berjiwa merdeka, berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan pada dirinya tertanam dasar kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila. Dengan generasi yang mampu memikul tanggungjawab sejarah, maka kita bisa optimis gerak pembangunan bangsa akan mencapai cita-cita kemerdekaan.*

RM SUWARDI SURYANINGRAT DI TENGAH REFORMASI PENDIDIKAN PAKUALAMAN DAN EROPA

Oleh: Ki Priyo Dwiwarso

KGPAA Paku Alam III (GPH Sasraningrat) yang bertahta tahun 1858 - 1864 mengawali restorasi pendidikan dengan menyisihkan harta Kadipaten Pakualaman dalam beasiswa "*Studen Fond*" bagi sentono (ningrat) Pakualaman untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. KGPAA Paku Alam III menyadari akan aset Projo Pakualaman yang sebagian besar berupa tanah yang relatif tandus di daerah Kulon Progo. *Studen Fond* ini menghasilkan antara lain sarjana-sarjana pertama pribumi dari Pakualaman di jaman kolonial, termasuk insinyur, dokter dan kepala suster pertama pribumi di Indonesia dari sentono Pakualaman. Suwardi Suryaningrat (SS) sebagai cucu KGPAA Paku Alam III termasuk sentono Pakualaman yang berkesempatan menikmati *studen fond* hingga ke pendidikan Stovia (Dokter Jawa). Adalah kebijakan yang cerdas dari Projo Pakualaman ketika para sentono sebelumnya harus lebih dulu dilandasi dalam pendidikan anak di Pesantren. Seperti halnya SS yang nyantri di Pesantren Kalasan asuhan Kyai Soleman Zainuddin. Penguatan budaya lokal sebelum menginjak pendidikan Kolonial sangatlah tepat karena di kemudian hari sarjana sentono Pakualaman ternyata lebih nasionalis termasuk perkembangan pribadi KHD. Beberapa

saat kemudian pada tahun 1866 Jepang baru melaksanakan Restorasi MEIJI oleh Kaisar Matsuhito yaitu dengan modernisasi Jepang di segala bidang kehidupan. Kemajuan budaya Barat dipadukan dengan *local wisdom* "bushido, samurai, kamikaze" menjadi modal keunggulan Jepang pada Perang Dunia II hingga Era Industrialisasi dan Milenial.

KHD dibuang (*eksterneer*) ke Negeri Belanda pada tahun 1913 sampai dengan 1919 beruntung karena bersamaan saat itu terjadi pula reformasi sistem pendidikan (*Reformspaedagogie*) di Eropa. Tokoh Pendidikan Eropa yang berpengaruh saat itu antara lain Friedrich Frobel, dr Maria Montessori, Rabindranath Tagore, J. Dalcroze, Rudolf Steiner yang mengubah pola pikir sistem dunia pendidikan yang semula *top down system* menjadi *bottom up system*. Teori lama tentang "tabularasa" yaitu asumsi bahwa jiwa siswa bagai lembaran kertas putih yang akan diberi warna sesuai ajaran guru (*top down*). Dirubah dalam reformasi pendidikan secara *bottom up* dengan utamakan kodrat bakat talenta sang anak yaitu "*eurythme*" agar secara alami bisa mengembangkan "*aestetische instincten*" (phonemic). Tahun 1913 – 1915 SS menempuh pendidikan Paedagogie di Nederland dan tanggal

12 Juni 1915 mendapatkan sertifikat (*Hoofd Acte*) sebagai pengajar Eropa dari Gerhard Jan Lightard Instituut. Sementara sang isteri Nyi Sutartinah (NS) mengajar di Kinder Garten Frobel School yaitu sekolah anak-anak dengan metode Frobel. NS sangat berperan dalam mendorong SS mengalihkan perjuangan dari perjuangan politik dan jurnalisme, ke bidang pendidikan bangsa yang sangat diperlukan untuk bekal kemerdekaan. Fahaman Friedrich Frobel dengan konsep "*Kinder Garten*" (Taman Kanak-Kanak) memberi kebebasan dan kenyamanan kepada sang anak untuk berkembang sesuai kodrat talentanya.

Tanggal 3 Juli 1922 SS mendirikan *Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa* (Yayasan Perguruan Nasional Tamansiswa) dimulai dengan Taman Lare atau *Kindertuin* sesuai pengalaman NS mengajar di Den Haag. Tamansiswa berkembang sangat pesat dan secara bertahap melengkapi jenjang pendidikan lanjutannya hingga terbentuk Tamansiswa *Kweekschool* (Sekolah Guru Pribumi) yang mutunya tidak kalah dengan sekolah kolonial hingga menjadi sekolah favorit kala itu. Cabang Tamansiswa bertambah dengan cepat hingga ke luar Jawa dengan jumlah lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia.

Tanggal 3 Februari 1928 SS genap berusia 5 windu (40 tahun Jawa) mengubah namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara (KHD) merupakan sublimasi misi hidup dari *Satriya Pinandita* menjadi *Pandita Sinatriya* yaitu pandita pendidik pejuang dan penegak kebenaran.

Rabindra Nath Tagore pemenang Nobel pertama dari Asia

sebagai sahabat KHD saat di Eropa meninjau ke Tamansiswa Yogyakarta tahun 1927 karena tertarik kesamaan metodenya dengan sekolah Shanti Niketan yang didirikannya di Bolpur India. Dr Maria Montessori sahabat KHD dari Italia berminat meninjau ke Tamansiswa namun gagal karena suasana genting menjelang PD II. Dr Maria Montessori mengembangkan talenta biologis sang anak dengan silabi dan sistem yang lebih terarah dalam program yang disiplin namun dengan kemerdekaan lebih luas (*absoluut vrijheid*). Rudolf Steiner banyak memfasilitasi sifat kodrat dolanan pada sang anak (*eurythme*) untuk mengembangkan potensi psikomotorik sang anak.

- Para tokoh pendidik Eropa inilah yang memperkaya konsep KHD dalam menyusun Sisdiknas ala Indonesia berupa pendidikan modern Barat dikawinkan dengan *local wisdom* yang telah berlaku di Nusantara sejak pra kolonial. KHD sebelum melansir Teori Trikon terlebih dulu telah melaksanakannya yaitu mengambil sistem universal yang manfaat, namun tetap berakar pada *local wisdom* dan secara kontinyu berproses menuju kesempurnaan. Trikon oleh KHD dijabarkan secara **Konvergen** yaitu membuka pergaulan dengan dunia *universal*, mengambil manfaat bagi kemajuan bangsa sendiri. Namun diolah secara **Konsentris** yaitu tetap berakar pada karakter luhur bangsa sendiri (*local wisdom*). Semuanya harus dikelola secara **Kontinyu** berkesinambungan dari waktu ke waktu, generasi ke generasi agar kokoh menjadi budaya khas nasional kita. Dengan demikian maka bangsa kita akan berhak dan

pantas berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa-bangsa yang kuat dan maju di dunia ini, dimulai dengan pembentukan kepribadian yang sangat khas dari bangsanya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut KHD mendapat gelar DR HC dalam Bidang Kebudayaan dari UGM tanggal 19 Desember 1956.

Selama budaya dalam proses pengelolaan Trikon, ada kemungkinan kita tergelincir dalam masalah teknis yang justru semakin menjauh dari sasaran "Goal Setting" yang sudah kita tetapkan yaitu membina generasi penerus yang berkarakter keindonesiaan. Sehubungan itu KHD memberikan kiat SBII (Sifat, Bentuk, Isi dan Irama). Sifat sesuai Azas Tamansiswa dan sebagai Badan Perjuangan Kebudayaan dalam proses ini tidak boleh berubah sepanjang waktu guna memelihara momentum perjuangan mengisi kemerdekaan kita. Sedang **Bentuk**, **Isi** dan **Irama** sistem pendidikan nasional kita dapat menyesuaikan dengan perubahan alam dan jaman yang semakin lama

semakin maju. Pembentukan karakter keindonesiaan hanya dapat dibina dari *character and nation building* yang simultan di segala bidang pendidikan bangsa. Pendidikan yang tidak merata berupa sekolah-sekolah eksklusif (SBI, Unggulan) selain hanya mementingkan segi intelektual dan kognitif belaka, berakibat menjauhkan kaum pelajar dan mahasiswa dari aspirasi rakyat. Sekolah/Universitas eksklusif hanya akan memperlebar jurang kaya-miskin negeri ini dan menambah kerawanan sosial dari waktu ke waktu.

Setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, kita patut merenung dan mengkaji konsep KHD sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang merupakan hasil proses sublimasi budaya secara konvergen dan konsentris yang harus dikelola secara kontinyu dalam membina karakter keindonesiaan yang Pancasila dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

(Ki Priyo Dwiwarso, Anggota Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa).

“

(1524)

"Kepentingan keluarga sebagai pusat pendidikan tidak hanya disebabkan karena adanya kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mengadakan pendidikan individu dan sosial, akan tetapi juga karena ibu-bapa dapat menanam segala benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri, di dalam jiwanya anak-anak; inilah haknya orang tua yang terutama dan tak boleh dibatalkan oleh orang lain"

(Ki Hadjar Dewantara: 'Sistim Trisentra', Wasita No.4, Juni 1935)

”

MELAWAN KEBIJAKAN SEKOLAH SWASTA SEBAGAI EMBEL-EMBEL

Oleh: Darmanto

Topik ini sengaja saya pilih karena dua alasan utama. Pertama, Buletin edisi ini terbit saat menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021. Kedua, setidaknya ada tiga artikel Ki Hadjar Dewantara (KHD) mengenai sekolah swasta yang dimuat dalam buku beliau Bagian Pertama: Pendidikan. Dari ketiga artikel tersebut tampak jelas keperpihakan KHD terhadap sekolah swasta yang pada zamannya disebut dengan istilah partikelir.

Melalui artikel berjudul, "Penghargaan terhadap Perguruan Partikelir" (hlm 150-153) yang dimuat oleh surat kabar Asia Raya tanggal 27 Maret 1943, KHD memberikan apresiasi atas sikap Pemerintah Dai Nippon yang mengabulkan usulan Majelis Luhur Taman Siswa (MLTS) tentang perlunya penyeteraan ijazah lulusan SMP swasta dengan ijazah SMP Negeri. Dengan adanya persamaan ijazah tersebut maka anak-anak yang berijazah Taman Dewasa berhak menempuh ujian masuk sekolah menengah tinggi kepunyaan negeri. Perjuangan MLTS sesungguhnya tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan Taman Dewasa, tetapi juga bagi sekolah partikelir lainnya.

Menurut KHD, keputusan Kantor Pengajaran di Jakarta Nomor 996/bg, tertanggal 13 Maret 1943 tersebut

merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Dai Nippon terhadap perjuangan para penyelenggara sekolah swasta untuk memajukan kehidupan bangsa. Keputusan tersebut menandakan bahwa Pemerintah sangat mementingkan kemajuan masyarakat dan menghargai pengorbanan tenaga rakyat dalam memajukan pendidikan dan pengajaran. Bagaimana pun, kehadiran sekolah partikelir telah berkontribusi besar dalam mengurangi angka buta huruf. Sikap Pemerintah Dai Nippon berbanding terbalik dengan kolonial Belanda yang menganggap sekolah-sekolah partikelir sebagai sekolah liar, dan karenanya tidak mendapat perlindungan, bahkan dianggap membahayakan

Sementara itu artikel kedua yang berjudul, "Kedudukan Sekolah Partikelir di dalam Republik," dimuat di majalah Pusara edisi April 1948. Menurut KHD, dalam sistem demokrasi, tiap-tiap orang berhak untuk memelihara aliran hidupnya, dan untuk mewujudkan hal itu pada umumnya dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran. Oleh karenanya meskipun hak mendidik dan mengajar itu prinsipnya ada pada orang tua, tetapi kewajiban penyelenggaraannya ada pada negara, sehingga segala biaya yang sifatnya umum dari sekolah swasta harus ditanggung oleh pemerintah sesuai

peraturan keuangan yang sama dengan sekolah negeri. Meskipun menanggung biaya, tetapi Pemerintah tidak berhak intervensi terhadap sekolah swasta, terkecuali untuk tiga hal, yakni melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas pendidikan dan pengajaran, serta menjamin bahwa sekolah swasta tersebut tetap menguntungkan negara dan rakyatnya (hlm.183-184).

Adapun artikel ketiga berjudul "Subsidi Sekolah Partikelir" dimuat di Mingguan Nasional edisi 22 Desember 1951. Dalam artikel ini KHD kembali menegaskan pentingnya negara memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi tiap-tiap golongan yang berideologi untuk mendirikan sekolah guna memelihara cita-cita kebatinannya. Penegasan itu perlu disampaikan mengingat sikap Pemerintah selama ini dalam memandang sekolah swasta masih dianggapnya sebagai embel-embel (asesoris semata). Padahal Pemerintah harusnya tetap mendukung golongan-golongan khusus untuk mendirikan sekolah swasta guna memelihara ideologi masing-masing. Kewajiban pemerintah adalah melakukan pengawasan agar sekolah swasta tetap menjaga kualitas, tidak menyalahi syarat-syarat ketertiban dan keamanan umum (hlm. 210). Pemerintah harusnya menjamin bahwa tiap-tiap anak yang bersekolah di sekolah swasta mengeluarkan biaya yang sama dengan biaya anak-anak yang bersekolah di negeri. Dengan demikian, peraturan mengenai subsidi bagi sekolah swasta jangan sampai memuat syarat pembatasan selain yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan umum, serta mutu

pengajaran. Pemerintah jangan memaksanakan ketentuan yang diperntukkan bagi sekolah negeri kepada seakolah swasta, selain yang b e r k a i t a n d e n g a n pertanggungjawaban administrasi keuangan (209-211).

Bagi penyelenggara sekolah swasta, seruan KHD tersebut kini masih sangat relevan. Sebab, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (Pemda) selama ini cenderung memarginalkan sekolah swasta. Dalam hal kurikulum misalnya, terjadi adanya penyeragaman antara sekolah swasta dan negeri sehingga kekhasan dari sekolah swasta menjadi kurang terjaga. Padahal menurut KHD, memang perlu adanya kurikulum yang sifatnya umum, sekarang disebut sebagai kurikulum nasional, tetapi selebihnya berisi materi yang sifatnya untuk pengembangan kekhasan sekolah swasta.

Di samping itu, upaya pelemahan juga tampak dari kebijakan dalam pendirian sekolah-sekolah negeri. Selama ini, pendirian sekolah negeri baru oleh Pemerintah/Pemda sepertinya tidak mempertimbangkan pengaruhnya terhadap sekolah swasta yang sudah ada. Artinya, meskipun di zona yang bersangkutan sudah ada s e k o l a h s w a s t a , t e t a p i Pemerintah/Pemda tetap saja mendirikan sekolah negeri yang setingkat. Jadi betul anggapan KHD bahwa selama ini Pemerintah/Pemda menganggap sekolah swasta memang hanya embel-embel. Seharusnya Pemerintah/Pemda ikut bertanggung jawab menjaga kelanjutan sekolah swasta yang sudah ada sebelum lahirnya sekolah negeri di lingkungan setempat.

Kebijakan secara sistematis untuk mematikan sekolah swasta juga terlihat dari adanya pengurangan dan/atau menghentikan pemberian bantuan guru berstatus PNS ke sekolah swasta, terutama sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Guru-guru yang semula wiyata bakti di sekolah swasta, tetapi kemudian diangkat menjadi PNS pascaberlakunya UU ASN, mereka tidak ditempatkan di sekolah asal melainkan di sekolah negeri.

Selain itu, langkah mematikan sekolah swasta juga dilakukan melalui kebijakan PPDB. Salah satu contoh kasus yang penulis persoalkan pada tahun 2020 adalah implementasi Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Nomor 052 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021. Dalam regulasi tersebut, proses PPDB untuk tingkat SMP dilakukan secara online dengan memisahkan antara sekolah negeri dan

swasta. Akibatnya banyak sekolah swasta tidak kebagian murid karena secara sosio kultural masyarakat Indonesia, masih menganggap bahwa sekolah negeri lebih terpercaya dibanding sekolah swasta. Di samping itu memang ada factor bahwa jumlah out put SD cenderung menurun terus, dan daya tampung sekolah negeri juga besar. Untuk menyelamatkan sekolah swasta mestinya ada kebijakan memperkecil daya tampung pada sekolah sekolah negeri.

Memang ironis! Sudah genap 70 tahun artikel KHD dipublikasikan, ternyata belum ada perubahan kebijakan yang signifikan terhadap sekolah swasta. Pemerintah tetap saja menganggap sekolah swasta hanya sebagai embel-embel, bukan entitas yang harus dijagai eksistensinya.*

Darmanto adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Muda yang menaungi TK dan SMP Bina Muda Panggang, Gunungkidul. Email: darmantopm@gmail.com



Kegiatan PBMTS Th. 1976, nampak hadir Ki Soeratman, Mashuri S.H, Ki Moch. Tauchid, dan Ki H. Samawi (Foto 60 Tahun Tamansiswa)

TAMANSISWA

Persemaian Kusuma Bangsa

Ki Juru Bangunjiwa

SEANDAINYA Ki Hadjar Dewantara masih 'sugeng', mungkin beliau akan merombak total sistem pendidikan yang tengah berlangsung di sekolah. Saya yakin Ki Hadjar Dewantoro amat respon terhadap situasi. Orang-orang seperti Ki Hadjar pasti mempunyai semboyan 'teguh dalam prinsip, luwes dalam pelaksanaan'. Mungkin hal ini bisa menjadi semacam renungan bagi Tamansiswa sendiri.

Ide dasar dari Ki Hadjar memang indah. Jadikanlah sekolah sebagai taman bagi para siswa. Taman tempat mekarnya bunga-bunga bangsa, tempat memupuk semangat dengan lambaran kasih sayang-asih-asah dan asuh.

Tetapi bagaimana impian Ki Hadjar itu bisa terwujud, manakala guru dibebani dengan target-target dan beban yang tidak ringan. Sementara dari rumah persoalan rumahtangga sudah seabrek yang dipikulnya. Instruksi yang diberikannya pun kelihatannya seperti momok. Guru kemudian menimpakan kekesalan tugasnya pada murid. Belum lagi penghargaan terhadap jerih payah guru hanya dihargai dengan sebutan 'Pahlawan tanpa tanda jasa' yang nota bene tidak bisa menopang kehidupan sehari-hari dengan layak, apalagi harus berpikir mengembangkan bidang keilmuannya. Oleh karena itulah bukan tanpa alasan kalau murid kemudian jadi obyek yang kadang harus dijejali dengan muatan-muatan materi kurikulum. Kadang tidak bisa dibedakan antara anak dan robot yang dituntut untuk menirukan

keinginan gurunya. Sementara dari rumah anak sudah disetel demi keinginan orangtuanya. Seusai sekolah harus les, ini, itu atas dorongan orangtuanya agar anaknya menguasai ketrampilan tertentu yang nantinya diharapkan berguna bagi anaknya, dan tentu saja menopang prestise orangtuanya, meskipun anaknya enggan untuk membantah perintah orangtuanya itu.

Yang sedikit memprihatinkan adalah pembinaan mental-spiritual anak, sedikit banyak terabaikan. Yang lebih parah lagi, anak kehilangan taman bermain, kehilangan kesempatan untuk bergembira. Kesekolah ibarat beban hidup yang sebenarnya tak diinginkan oleh anak. Oleh karena itu pelampiasannya pun macam-macam. Ada yang merokok, menegak minuman keras, ngepil, mencari kebebasan di mall dan pasar swalayan yang berkecenderungan bikin onar, tawuran dan masih banyak lain kegiatan negatif lainnya.

Sekolah bukan lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak. Namun situasi ini bukan kesalahan siapa-siapa. Sejarah memang tidak bisa disalahkan. Proses sejarahlah yang memang harus demikian. Namun semua itu harus disadari semua pihak. Sebab faktor pendidikan sekolah ini amat memegang peran penting dalam menumbuhkembangkan anak, baik secara mental-spiritual maupun aspek lain. Kita lihat bagaimana ulah anak ketika mereka lulus dari SMP maupun SMA,

mereka melepaskan kegembiraan di jalanan. Seolah mau mengatakan bahwa mereka kini bebas. Padahal mereka masih harus mencari sekolah lanjutan lagi yang bagi orangtuanya bisa jadi bikin pusing tujuh keliling.

Kita berharap banyak agar anak-anak yang lulus sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah, atau lanjutan atas langsung ke Masjid atau ke Gereja atau Pura, atau ke mana saja untuk mengucapkan doa syukur. Syukur-syukur kalau ada yang mengucapkan syukur itu dibarengi dengan niatan baik menyumbangkan seragam atau buku-bukunya yang tidak terpakai lagi untuk siswa-siswa lain yang mungkin masih memerlukannya.

Impian Ki Hadjar untuk menjadikan sekolah sebagai taman, memang jauh panggang dari api. Sekolah sebagai tempat yang menarik untuk berrekreasi, berkreasi, memupuk saling setia kawan, saling kasih, saling asah dan saling asuh, saling menghormati, sulit untuk diwujudkan. Sekolah diharapkan menjadi alternatif kesempatan untuk memupuk hobi yang sehat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, olahraga, olah pikir, hoby baca dan lain sebagainya yang memacu dan memicu anak untuk berpikir kreatif sambil bercengkerama, memang amat sulit diwujudkan. Masalah ini kiranya bisa menjadi sebuah wacana permenungan bagi Tamansiswa khususnya dan pendidikan umum lainnya pada umumnya.

Untuk itulah sebenarnya Ki Hadjar menurunkan semboyan yang diperas dari sebuah mahakarya Sultan Agung Sastra Gending yakni 'Ing arsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani'. Teladan-teladan yang pantas dilihat anak masih adakah? Lalu untuk membangun tekad anak masihkah disimak oleh para guru. Pun kalau di belakang, apakah kita semua, khususnya guru masih sabar untuk 'tutwuri handayani'.

Sekolahnya boleh tradisional,

tetapi cara pikirnya harus global. *'Think globally, act locally'*.

Kita bisa lihat bagaimana Ki Hajar menjabarkan salah satu inti dari 'Sastra Gending' dalam bahasa yang gampang. Bisa kita bandingkan atau sejajarkan pemahaman Sastra Gending dengan dimensi psikologi anak yang digarap oleh pakar-pakar manca yang disebut dengan Intelligence quotient (IQ), Emotion Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ), di Jawa disebut dengan Tata Basa, Tata Rasa dan Tata Brata. Hanya saja pemahaman akan budaya Jawa yang bertujuan 'Hamemayu hayuning bawana' sudah dilupakan oleh sebagian masyarakat Jawa khususnya, dan Nusantara pada umumnya.

Tata basa dimaksudkan anak diperkenalkan dengan etika dan tata cara hidup dengan menempatkan diri secara benar. Lewat bahasa ibu, yang sekarang sudah banyak dilalaikan, lantaran digilas pemahaman Sumpah Pemuda yang salah kaprah, anak dibimbing untuk belatih 'udanegara, unggah-ungguh' menghormati orangtua, menghormati sesama dan lain sebagainya. Lewat bahasa, anak ditempa untuk memahami siapa dirinya sesungguhnya dan untuk apa ia hidup. Disini dibutuhkan ketrampilan untuk merangkai kata dan tindakan agar pemahaman akan bahasa disertai laku yang selaras. Sumpah Pemuda yang salah satu sumpahnya berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia, diganti dengan Berbahasa satu bahasa Indonesia yang menyiratkan kepentingan komersial yakni demi kapitalisme yang berkembang di dunia. Dengan begitu bahasa ibu tidak mendapatkan tempat lagi di hati masyarakatnya.

Kemudian tata-rasa, adalah mengolah rasa, memahami jati diri manusia secara mendalam, bahwa manusia dan lingkungannya itu sesungguhnya berasal dari sumber yang sama yakni Allah Yang Maha Esa, untuk apa berselisih, bertengkar. Didalam pemahaman ini mengalir pengertian untuk

hidup rukun bergotong royong. Perbedaan yang ada bukan sebagai tantangan, tetapi justru sebagai warna-warni kehidupan. Manusia wajib memberi garisbawah pada warna-warni duniawi ini agar semakin indah dan bermakna bagi kehidupan dunia ini, sehingga makin membuat dunia nyaman untuk hidup.

Kemudian Tata Brata menyiratkan keprihatinan, yang merupakan spirit hidup, semangat hidup yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Bisa jadi didalam hal ini tata brata bisa merupakan sebuah kriteria untuk bertahan dan terus berkarya dalam semangat dasar kehidupan yang sangat kuat. Struggle of live- yang tinggi. Atau perjuangan hidup yang sangat dahsyat. Ketekunan menjadi landasan hidup masyarakat. Melakukan yang biasa secara luar biasa.

Kalau semangat Jawa ini mengedepan kembali dan didukung oleh Taman Siswa, artinya semangat bangsa ini kembali bersinar selaras dengan tembang kebangsaan ciptaan Wage Rudolf Supratman, dengan kata-kata 'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya', bukan tidak mustahil harapan itu akan terwujud.

Dari sinilah bisa diharapkan munculnya seorang manusia Indonesia yang bebas namun bertanggungjawab. Sebab yang terjadi akibat kebebasan yang terpendam selama beberapa dasa warsa ini membuat kebebasan manusia Indonesia salah arah, bikin kacau, setelah mereka mendapatkan kebebasan. Bahkan tanggungjawabnya dilalaikan.. Boleh dibilang kebebasan yang kebablasan. Setiap orang seolah bebas melakukan apa saja. Bahkan para penjahat, perusak, pembunuh berdarah dingin berkeliaran bebas. Para pembela mereka mendapatkan liputan bebas dari media massa. Sementara itu berita-berita yang menyejukkan malah dicekal, disensor. Self sensorship. Para tycoon media enggan menurunkan berita-berita macam itu karena takut diteror..

Siapa yang memberi julukan mereka itu. Tanpa kita sadari ya kita semua. Sebutan teroris bagi penjahat, perusak dan pembunuh merupakan pengakuan akan keberhasilan mereka menyebarkan terror. Kita seharusnya tidak perlu takut kepada mereka. Kita sadar bahwa pembunuh adalah penjahat, perusak adalah penjahat, koruptor adalah penjahat. Penyebar kebencian adalah penjahat. Namun demikian kita dan anak-anak kitapun perlu sadar bahwa kekerasan hanya dapat diatasi dengan kelembutan. Penawar kebencian adalah kasih. Seperti halnya najis hanya dapat dibersihkan dengan air bersih. Manusia Indonesia tidak berpihak kepada kebencian dan kejahatan.

Karena kita berharap manusia Indonesia bebas dari kejahatan dan kebencian. Manusia Indonesia bebas merdeka dan berdaulat. Manusia Indonesia tidak pula terbelenggu oleh petuah para budak nafsu rendahan. Walau budak-budak nafsu itu kadangkala berdandan rapi dan berkesan berakhlak beragama dan berpengetahuan.. Manusia Indonesia nantinya harus menolak diperbudak. Diperbudak siapa saja, sekalipun menggunakan dalil agama. Karena ia hanya berhamba kepada Allah, pada kasihNya, pada rahkmatNya, tidak pada penafsir ayat-ayat suci yang sering dipelintir artinya demi kekuasaan dan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Kebebasan hidup manusia inilah yang membuat hidup semakin hidup. Tidak ada kehidupan tanpa kebebasan jiwa dan raga.

Dari pendidikan yang muncul di Taman siswa itulah kita juga bisa berharap akan lahirnya kebersamaan, kesetaraan dan keadilan sosial bagi sesama hidup yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sebagai petani ia tidak merasa rendah karena pekerjaannya. Ia sadar bahwa tanpa usahanya itu pembangunan negara dan bangsa sungguh tidak berarti. Negara

yang masih mengimpor kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah amat jelas berada di ambang kehancuran. Tinggal menunggu diperbudak.

Sebagai pejabat, ia perlu merasa malu bahwa gaji dan tunjangan yang diterimanya dari kas negara hasil pajak yang diambil dari rakyat setiap bulan melebihi tabungan seumur hidup seorang petani.

Sebagai wakil rakyat, ia perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa ketidaksadaran dan ketidakpekaan para pejabat negara, termasuk dirinya, menciptakan lahan subur bagi revolusi berdarah bagi masuknya lagi komunisme.

Sebagai pedagang, pengusaha, professional dan industrialis, iapun perlu tahu bahwa kesejahteraan dirinya tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan bagi semua. Ketenangan dan rasa aman yang dirasakan oleh para usahawan dan pedagang serta industrialis itu sungguh

semu, selama mereka-mereka yang tinggal di tempat-tempat kumuh masih tidur dengan perut kosong.

Para alim ulama, rohaniwan dan agamawan tidak lagi berpihak pada kekuasaan hanya untuk mempertahankan kedudukan dan status sosial mereka.

Para seniman, ilmuwan dan budayawan tidak melacurkan pengetahuan mereka, tidak menjual seni mereka, tidak menggadaikan budaya asal mereka, demi kepingan emas.

Dunia pendidikan kita tidak hendak menciptakan kelompok-kelompok eksklusif dan tidak menjadi bagian darinya – karena ia sadar bahwa eksklusivitas berlawanan dengan budayanya, bertentangan dengan ruh bangsanya, bertentangan dan semangat di balik kemerdekaan rakyat dan pendirian negara Indonesia.

Ki Juru Bangunjiwa, mantan Guru SKKA-Taman Ibu, penulis buku, pemerhati budaya, *Tinggal di Bangun Jiwo Kasihan Bantul*.



Peluncuran Buletin NENG NING NUNG NANG Di Sekretariat Redaksi Jalan Sagan No.20 Yogyakarta

Pemimpin Redaksi NENG NING NUNG NANG dalam acara sarasehan yang ditayangkan JITV Pemda DIY, Buletin SATU ABAD TAMANSISWA



Implementasi TERTIB DAMAI

Oleh : Ake Endang Murni
Murid Tamansiswa tahun 1965 - 1977

Tulisan ini, merupakan tafsiran pribadi atas tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara, yang ada di Buku I Pendidikan. Tafsiran pribadi ini tentunya masih perlu didiskusikan untuk kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk pedoman atau sekadar acuan bagi kita, para pendidik.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, mendidik itu tidak sama dengan mengajar. Mengajar, titik beratnya adalah pada peningkatan kemampuan siswa dalam ranah ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan mendidik, titik beratnya adalah pada peningkatan kemampuan siswa dalam berperilaku. Jadi, mendidik adalah mengajarkan budi pekerti. Pamong/guru di Tamansiswa, seyogyanya tidak sekedar mengajar, namun juga mendidik.

Nah, sebagai pendidik, bila ada siswa kita yang hadir terlambat, maka apa yang harus kita lakukan? Apa konsekuensi yang harus diterima oleh siswa, akibat kehadirannya yang terlambat?

Rupanya jawaban untuk pertanyaan ini cukup beragam. Konsekuensi yang harus diterima siswa, antara lain :

1. Siswa dilarang masuk kelas.
2. Siswa boleh masuk kelas, namun harus berdiri di depan kelas.
3. Siswa disuruh menyapu halaman.
4. Siswa disuruh lari keliling lapangan.

5. Siswa disuruh membersihkan toilet.

6. Siswa disuruh pulang.

7. Siswa tetap boleh masuk kelas dan mengikuti pelajaran, namun pulangannya dilambatkan.

Konsekuensi yang akan diterima siswa, apapun bentuknya, selama konsekuensi itu diberikan semata-mata demi kepentingan siswa, barangkali dapat kita anggap sah-sah saja.

Dari ketujuh jawaban tersebut, tampaknya yang paling sesuai dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara, adalah yang nomer 7. Jadi, bila ada siswa kita yang hadir terlambat, maka siswa tersebut tetap boleh masuk dan boleh mengikuti pelajaran yang diberikan oleh pamong/guru. Lalu, dimana proses mendidiknya?

Siswa yang terlambat tersebut, diberitahu bahwa dia harus minta maaf atas keterlambatannya. Bila diperlukan, siswa juga dapat menjelaskan sebab keterlambatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selanjutnya, siswa tetap diperbolehkan mengikuti pelajaran. Namun pada saat pulang, siswa tersebut tidak bisa pulang bersama teman-temannya. Dia harus menambah waktu belajarnya, sesuai dengan waktu keterlambatannya. Tambahan waktu tersebut, digunakan untuk melengkapi pelajaran-pelajaran yang tertinggal, karena keterlambatannya.

Konsekuensi yang diberikan kepada siswa yang terlambat tersebut, sesuai dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa "konsekuensi harus sesuai (punya hubungan yang logis) dengan perbuatan yang dilakukan". Datangnya terlambat, maka pulanginya terlambat juga.

Ada contoh lain dalam mengajarkan budi pekerti kepada siswa. Contoh ini diceritakan oleh seorang bekas murid Taman Siswa Jakarta Angkatan tahun 50-an. Menurut cerita beliau, saat itu para siswa sedang menikmati jam istirahat. Mereka makan kuaci dan kulitnya dibuang sembarangan di lantai. Kuaci adalah camilan dari biji semangka yang dikeringkan. Kemudian, datanglah

salah satu pamong piket, yang sedang berkeliling memantau para siswa yang sedang istirahat. Pamong tersebut lalu bergabung, ikut makan kuaci dan ikut membuang kulit kuaci di lantai. Namun, ketika kuaci sudah habis, maka pamong tersebut mengambil sampah kulit kuaci tersebut, sambil mengatakan bahwa kulit kuaci ini merupakan sampah, yang harus dibuang di tempat sampah. Para siswa segera sadar dan berebut untuk mengambil sampah kulit kuaci tersebut untuk dibuang di tempat sampah.

Dari kedua contoh diatas, semoga kita dapat merasakan suasana tertib yang damai. Ketertiban yang diajarkan secara damai dan penuh kasih.



Konferensi Pendidikan Seluruh Indonesia di Yogyakarta pada Oktober 1949. Ki Hadjar Dewantara memberikan sambutannya di depan peserta yang hadir dalam Konferensi Pendidikan Seluruh Indonesia di Yogyakarta.